**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

**Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.**

**Dan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang ormas atau organisasi kemasyarakatan, adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.**

**Tujuan dari organisasi masyarakat adalah meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat, menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral , etika dan budaya yang hidup dalam masyarakat, melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan /atau, mewujudkan tujuan negara**

Fungsi dari organisasi masyarakat sebagai berikut, penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/ atau tujuan organisasi, pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi, penyalur aspirasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pemenuhan pelayanan social, partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau, pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Organisasi sosial adalah perkumpulan [sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Sosial) yang dibentuk oleh [masyarakat](https://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat), baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan [hukum](https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum), yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai [makhluk](https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk) yang selalu hidup bersama-sama, [manusia](https://id.wikipedia.org/wiki/Manusia) membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri. Pada awalnya lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang

dianggap penting dalam hidup bermasyarakatan. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu yang saling membutuhkan, kemudian timbul aturan-aturan yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Lembaga sosial sering juga dikatakan sebagai sebagai Pranata sosial. Suatu [norma] tertentu dikatakan telah melembaga apabila norma tersebut : diketahui, dipahami dan dimengerti, ditaati dan dihargai.

Organisasi sosial lokal tumbuh dari berbagai latar belakang, dengan ikatan pemersatu utama adalah kesamaan agama, asal daerah, profesi, ide/minat dan hubungan kejerabatan. Peran Organisasi sosial dalam pembangunan kesejahteraan sosial adalah menggalang potensi menjasi sumber kesejahteraan sosial untuk membantu orang atau keluarga anggota terutama dalam situasi sulit berkaitan dengan siklus kehidupan (kelahiran, pendidikan, kesehatan, perkawinan dan kematian) Sampai sejauh ini peran organisasi sosial masih sangat terbatas baik dari sisi kuantitas maupun jangkauan. Oleh sebab itu sesuai dengan sifat dan hakekatnya maka organisasi sosial dipandang perlu diberdayakan lebih lanjut. Bagi instansi pemerintah, seperti Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat menjadikannya mitra strategis, perpanjangan tangan pemerintah dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

**Peningkatan kapasitas** (capacity building) merupakan suatu proses untuk melakukan sesuatu, atau serangkaian gerakan, perubahan multi level di dalam individu, kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sistem-sistem dalam rangka untuk memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi sehingga dapat tanggap terhadap perubahan lingkungan yang ada.

**Bidang Keluarga Berencana & Kesejahteraan Keluarga** melaksanakan program peningkatan kapasitas baik kepada institusi, masyarakat maupun organisasi masyarakat/organisasi sosial. Dalam pelaksanaannya, peningkatan kapasitas ini dibuat dalam bentuk sosialisasi untuk memberikan pemahaman dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program kegiatan untuk mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) ditengah masyarakat Kegiatan berbentuk sosialisasi penting bagi kita untuk menyamakan persepsi dengan organisasi masyarakat/organisasi sosial tentang program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di masyarakat sehingga berlangsung sukses untuk mewujudkan masyarakat yang berketahanan dan sejahtera.

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan
2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pembangunan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Prov.Sumbar tahun anggaran 2019.
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 18 Februari 2019 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Dukcapil Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019 . DPA SKPD Nomor : 1.02.08.1.02.08.01.113.001 tanggal 16 Januari 2019
14. Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, KB , Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Nomor : 476/81 /DPPKBKPS.3/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2019
15. Tujuan

* Umum

1. Memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/organisasi sosial agar dapat ikut serta melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pembinaan keluarga balita dan anak, pembinaan ketahanan remaja , pembinaan ketahanan keluarga lansia, keluarga rentan dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
2. Dengan melibatkan organisasi masyarakat/organisasi sosial diharapkan pembinaan ketahanan keluarga dapat optimal dilakukan sesuai dengan tujuan ormas yaitu dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
3. Menjadikan organisasi masyarakat/organisasi sosial sebagai mitra strategis pemerintah untuk memberikan input permasalahan yang ada di masyarakat, pengkajian solusi secara integratif, penyusunan rencana tindakan dari program/kegiatan, implementasi bersama dilapangan dalam rangka mengembangkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
4. Menjadikan organisasi masyarakat/organisasi sosial sebagai Duta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK) untuk melakukan pembinaan langsung ke anggotanya

* Khusus

Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bahwa untuk pembagian urusan pemerintahan dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan keluarga sejahtera, pemerintah provinsi melalui DPPKBKPS Provinsi Sumatera Barat memiliki kewenangan untuk melakukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat provinsi dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

1. Pembiayaan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosia Dalam Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun anggaran 2019 dengan nomor rekening : 1.02.08.1.02.08.01.113.001 Tanggal 16 Januari 2019 dengan total anggaran 39.120.000,-(tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh ribu rupiah) .

**BAB II**

**KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

1. Pra Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi Sumatera Barat, dilaksanakan selama 2 (dua) kali pada tanggal 10 dan 17 September 2019, bertempat di Aula Kantor DPPKBKPS Padang , dengan jumlah peserta organisasi masyarakat/organisasi sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang diundang sebanyak 90 orang . Dengan rincian 45 (empat puluh lima) orang yang pada tanggal 10 September 2019 dan 45 (empat puluh lima) orang lagi pada tanggal 17 September 2019.

Sebelum pelaksanaan kegiatan dilakukan persiapan administrasi dan sarana prasarana pendukung kegiatan yang disiapkan untuk melaksanakan kegiatan diantaranya:

* + - 1. Persiapan administrasi dan pengiriman surat, seperti surat pemanggilan peserta, permintaan narasumber, pemesan makan dan minum peserta , membuat undangan pembukaan dsbnya

1. Pemesanan seminar kit sekaligus untuk 90 orang peserta
2. Menghimpun materi/makalah dari 6 narasumber untuk 2 (dua) kali kegiatan
3. Pembagian tugas untuk moderator
4. Checking tempat pelaksanaan kegiatan

B**.** Peserta

Peserta Pelatihan yang diundang sebanyak 90 (sembilan puluh ) orang yang terdiri dari 45 ( empat puluh lima ) orang peserta pada tanggal 10 September 2019 dan 45 ( empat puluh lima ) orang peserta pada tanggal 17 September 2019.

C. Fasilitas Peserta

Fasilitas peserta Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga adalah berupa konsumsi, seminar kit, dan penggantian uang transportasi bagi setiap peserta sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

D**.** Narasumber, Materi dan Moderator pada Kegiatan I

Narasumber, materi dan moderator pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat /Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

**Narasumber Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat /Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Tentang Bina Keluarga Balita (BKB)**

**Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **N A M A** | **MATERI** | **MODERATOR** |
| 1 | H.Novrial, SE, MA,Akt  DPPKBKPS Prov.Sumbar | Program Bina Keluarga Balita Secara Holistik dan Terintegratif | Ir.Puti Reno Sari |
| 2 | DR.dr.Dovy Djanas, SpOG (K)  RSUD Dr.M.Djamil Padang | 1000 Hari Pertama Penentu Kehidupan | Roza Ariyanti,S Si, M.T |
| 3 | Yeni Oktavia  Ibu Profesional Padang | Membangun Peradaban dari Rumah | Roza Ariyanti,S Si, M.T |

**Narasumber Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat /Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**

**Tentang Bina Keluarga Lansia (BKL)**

**Tahun 2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **N A M A** | **MATERI** | **MODERATOR** |
| 1 | Drs.Bahrizal Basir, M.M  TP-PKK Prov.Sumbar | Peran PKK Dalam Pembinaan Ketahanan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga Khususnya Lansia | Lisa Sri Dwiyana |
| 2 | Dra. Desra, M.M  BKKBN Perwakilan Prov.Sumbar | Program BKKBN Dalam Kelompok Bina Keluarga Khususnya Lansia | Lisa Sri Dwiyana |
| 3 | Gusti Sumarsih,S.Kp,M.Biomed  PPNI Kota Padang | Lansia Tangguh Dimensi Fisik dan Dimensi Intelektual | M.Syarifuddin,SH |

E**.** Jadwal Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Bapak Novrial, SE, MA, Akt pada tanggal 10 September 2019, Jam 09.00 Wib, bertempat di Aula Kantor DPPKBKPS Prov.Sumbar dengan susunan acara sebagai berikut :

* + - * 1. Pembukaan
        2. Pembacaan Do’a
        3. Laporan Panitia Pelaksana
        4. Sambutan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat, Bapak H. Novrial, SE, MA.Ak
        5. Penyampaian Materi

f. Penutupan

Acara ditutup secara resmi oleh Kadis dengan diwakilkan oleh Sekretaris Dinas

g. Penyerahan penggantian biaya transportasi

Sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah direncanakan maka pada tanggal 17 September 2019 dilaksanakan kegiatan kedua dengan jadwal yang sama dengan kegiatan pertama dan materi serta narasumber yang berbeda.

1. Metode

Metode yang digunakan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Tahun 2018 ini adalah :

1. Ceramah
2. Diskusi/Tanya jawab
3. Kendala dan Hambatan

Sesuai dengan aliran kas untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Rangka Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga maka kegiatan pada tahun ini di laksanakan pada tanggal 10 dan 17 September 2019 di Aula Kantor DPPKBKPS .

Peserta yang diundang sebanyak 45 orang setiap kegiatan dan dapat dihadiri oleh semua peserta . Kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta masyarakat baru dilakukan untuk sub urusan keluarga sejahtera, sementara untuk urusan keluarga berencana belum dilakukan

1. Solusi

Meningkatkan pemberdayaan dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/organisasi sosial dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

**BAB III**

**HASIL YANG DICAPAI**

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan Keluarga yang diikuti oleh organisasi masyarakat/organisasi sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat yang telah dilakukan sebagai upaya untuk memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Provinsi dengan hasil yang dicapai sebagai berikut meningkatnya pemahaman dan wawasan organisasi masyarakat/organisasi sosial Tingkat Provinsi Sumatera Barat tentang pembinaan ketahanan keluarga khususnya Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia(BKL) sehingga dapat mengembangkannya di lingkungan organisasi umumnya dan di lingkungan keluarga khususnya

A**.** Hasil yang diharapkan melalui kegiatan ini :

1. Organisasi masyarakat/organisasi sosial dapat menjadi duta program KKBPK baik secara kelembagaan maupun secara perorangan untuk melakukan KIE dalam forum BKB, BKR dan BKL yang ditindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat/organisasi sosial tidak hanya sebagai peserta sosialisasi akan tetapi berperan serta sebagai pembina langsung program KKBPK di lingkungan organisasinya, keluarga dan masyarakat dalam bentuk mitra kerja kegiatan dengan membuat nota kesepahaman (MOU) antara Dinas PPKBKPS dengan organisasi masyarakat/organisasi sosial dalam mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)

2. Membangun keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

3. Meningkatkan kepedulian kesadaran dan tanggungjawab orang tua dalam membimbing, meningkatkan pengetahuan melalui intekrasi komunikasi yang sehat dan harmonis

4. Upaya dalam mengatasi perubahan pada proses menua

5. Mengerti dan memahami kategori menjadi seorang lansia tangguh

6. Sebagai mitra kerja strategis pemerintah untuk memberikan input permasalahan yang ada dimasyarakat , pengkajian solusi integratif, penyusunan rencana tindakan dari program/kegiatan dengan implementasi bersama di lapangan. Salah satunya dengan membuat nota kesepahaman (MOU) antara Dinas PPKBKPS dengan organisasi masyarakat/organisasi sosial dalam mensukseskan program KKBPK .

B. Capaian Realisasi Anggaran

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial Dalam Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tahun anggaran 2019 dengan nomor rekening : 1.02.1.02.06.01.089.0003 tanggal 5 Januari 2019 dengan total anggaran 39.120.000,- (Tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh juta rupiah) dengan realisasi Rp. 38.620.000,- ( Tiga puluh delapan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah ) dengan rincian realisasi fisik dan keuangan sebagai berikut :

**REALISASI BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN**

**PENINGKATAN KAPASITAS ORMAS/ORSOS DALAM PEMBINAAN KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

**TANGGAL 10 DAN 17 SEPTEMBER 2019**

**DI AULA KANTOR DPPKBKPS PROV.SUMBAR**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Kegiatan** | **Anggaran**  **(Rp)** | **Realisasi**  **(Rp)** | **Sisa**  **(Rp)** | **Fisik**  **(Rp)** | **Keu**  **(Rp)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | Belanja ATK  Belanja Seminar Kit Peserta  Belanja Belanja Peralatan Pakai Habis  Spanduk  Belanja transportasi peserta  90 @ Rp. 150.000,-  Belanja Honorarium  Narasumber PNS  -Ess II  -Ess III ke bawah  Belanja Honorarium Narasumber Non PNS  Praktisi  Belanja jasa moderator  Belanja pembawa acara  Belanja Pembaca doa  Belanja Peliputan  Belanja Penggandaan  -Fotokopi  -Jilid  Belanja mkn minum rapat  -makan  -minum  Belanja mkn minum keg  -snack  -makan | 2.275.000,-  4.500.000,-  2.000.000,-  1.200.000,-  13.500.000,-  3.000.000,-  2.000.000,-    1.500.000,-  2.000.000,-  100.000,-  300.000,-  100.000,-  975.000,-  150.000,-  310.000,-  310.000,-  2.100.000,-  3.100.000,- | 2.275.000,-  4.500.000,-  2.000.000,-  1.200.000,-  13.500.000,-  2.500.000,-  2.000.000,-  1.500.000,-  2.000.000,-  100.000,-  300.000,-  100.000,-  975.000,-  150.000,-  310.000,-  310.000,-  2.100.000,-  3.100.000,- | -  -  -  -  -  -  500.000,-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% | 100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100%  100% |
|  |  | **39.120.000,-** | **38.620.000,-** |  | **100%** | **98,72%** |

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

* + - 1. Pembinaan Ketahanan Keluarga merupakan bagian dari pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga yang merupakan urusan konkuren pemerintah daerah, yang membutuhkan dukungan seluruh pihak terkait, khusus dukungan dari organisasi masyarakat dan organisasi sosial, Dengan melibatkan organisasi masyarakat /organisasi sosial dalam pengembangan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diharapkan pembinaan ketahanan keluarga terutama Bina Keluarga Balita (BKB) , Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) dapat optimal dilakukan sesuai dengan tujuan ormas yaitu meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dan memberikan pelayanan kepada masyarakat
      2. Partisipasi organisasi masyarakat/organisasi sosial dalam pembangunan dilakukan dengan mengoptimalkan fungsinya sebagai pembinaan keanggotanya, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam format Komunikasi, Informasi dan Edukasi secara bersama dengan pemerintah. organisasi masyarakat/organisasi sosial adalah mitra strategis pemerintah untuk memberikan input permasalahan yang ada di masyarakat, pengkajian solusi secara integratif, penyusunan rencana tindak dari program/kegiatan, implementasi bersama di lapangan
      3. Organisasi masyarakat/organisasi sosial diharapkan dapat menjadi duta program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( KKBPK ) baik secara kelembagaan, maupun secara perorangan untuk melakukan KIE dalam forum BKB, BKR, dan BKL sehingga perlu dilakukan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat/organisasi sosial tidak hanya sebagai peserta sosialisasi akan tetapi berperan serta sebagai pembina langsung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilingkungannya

B. Saran

Perlunya sosialisasi lebih intensif agar dapat memberdayakan dan meningkatkan peran serta organisasi masyarakat/organisasi sosial dalam melakukan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga

Untuk pengembangan kegiatan, perlu melakukan identifikasi organisasi masyarakat/organisasi sosial yang memiliki tujuan organisasi yang sama dengan visi dan misi DPPKBKPS Prov.Sumbar

Perlunya anggaran yang lebih memadai untuk meningkatkan partisipasi dan peran serta tidak hanya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga tetapi juga dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB serta anggaran khusus untuk melibatkan langsung organisasi masyarakat/organisasi sosial Tingkat Provinsi yang memiliki massa banyak untuk bersama-sama berperan serta dilapangan sebagai pembina lansung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dilingkungan organisasinya, keluarganya dan masyarakat .

**KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah Hirobbil Alamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan HidayahNya, “ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi masyarakat/Organisasi sosial dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga “ telah dilaksanakan yang pembebanan anggarannya pada DPA-OPD Tahun 2019 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

Laporan ini merupakan gambaran informasi tentang pelaksanaan kegiatan di tahun 2019, yang memberikan pembinaan kepada organisasi masyarakat/organisasi sosial untuk mengembangkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam Bina Keluarga Balita (BKB) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) sehingga organisasi masyarakat/organisasi sosial dapat berpartisipasi dalam pembangunan untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai pembinaan keanggotaannya, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan sosial yang dilaksanakan dalam format Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) secara bersama dengan pemerintah.

Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan dan perbaikan, dengan harapan semoga laporan ini bermanfaat dan menjadi acuan dalam menyusun perencanaan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Padang September 2019

Kepala Dinas

Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat

H.Novrial, SE, M.Akt

Pembina Utama Madya

NIP. 19661105 199403 1 005

**DAFTAR ISI**

HAL

KATA PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG 1
2. DASAR HUKUM 2
3. TUJUAN 3
4. PEMBIAYAAN 4

BAB II KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 5

BAB III HASIL YANG DICAPAI 8

BAB IV PENUTUP 10

LAMPIRAN